

**PERSEPSI DAN PARTISIPASI
GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN BELEK LEREK
TERHADAP SISTEM HUTAN KEMASYARAKATAN
(Studi Kasus HKm Desa Baolangu, Kabupaten Lembata, Provinsi
Nusa Tenggara Timur)**

**PERCEPTION AND PARTICIPATION
COMBINED BELEK LEREK FOREST FARMER GROUP
TOWARDS THE COMMUNITY FOREST SYSTEM
(Case Study of HKm Baolangu Village, Lembata Regency, East Nusa Tenggara
Province)**

Vinsensius Dominggus Dolet¹⁾, Ludji Michael Riwu Kaho²⁾, Nixon Rammang³⁾, Maria M. E. Purnama⁴⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

²⁾ Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

³⁾ Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

⁴⁾ Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

*Email: vinsensiusdolet@gmail.com

ABSTRACT

The community's decision to participate or not in an activity is influenced by subjective factors such as the community's own perception of the activity (Ngakan, 2006). The importance of community perceptions about the purpose and benefits of community forestry as a system in forestry to be managed properly and correctly so as to achieve goals in preserving and prospering the community (Heryatna et al., 2015). The Baolangu Village Community Forest Utilization Business Permit was granted to the Belek Lerek Forest Farmer Group Association consisting of 5 forest farmer groups covering an area of + 150 Ha in the Protected Forest area in Baolangu Village. Of the 5 forest farmer groups formed, 1 forest farmer group remains active but in general the community continues to manage their Community Forest land. The purpose of this study was to determine the positive perceptions of the community about Community Forests that influence community participation in Community Forest management. The technique of taking respondents in this study used the census method, namely taking one population group as a whole sample and using a structured questionnaire as a data collection tool with a total of 77 respondents. The measurement scale used is the Likert scale model. The results showed that community participation of the Belek Lerek Forest Farmer Group Association in the implementation stage of the Community Forest was high (58.77%), and the utilization stage was high (61.29%), because the community managed their respective Community Forest areas by planting plantation crops, food and horticulture, the results of which were not only for consumption but also for sale. This is influenced by the community's positive perception of the Baolangu Village Community Forest, where the IUPHKm provides certainty of access rights to the community to participate in managing the forest area, the existence of the Community Forest can increase household income and community empowerment carried out by related institutions such as KPH Lembata is running well.

Keywords: Perception; Participation; Forest Farmer Group Association; Community Forest; Baolangu Village

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Gapoktan Hutan Belek Lerek mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 7580/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019 seluas $\pm$ 150 Ha pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Baolangu, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 19 September 2019. Gapoktan Belek Lerek terdiri dari 5 KTH yakni KTH Petik Pile, KTH Wai Tenar, KTH Kayu Kenesak, KTH Kerbaol Tubal dan KTH Lewokewek.

Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan HKm merupakan salah satu modal sosial dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang ada secara lestari dan berkelanjutan (Zulevi dan Adiwibowo, 2018). Partisipasi masyarakat merupakan respon tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat dilihat dari peran aktif masyarakat melalui sumbangan pemikiran, tenaga maupun pengorbanan waktu. Keputusan masyarakat untuk ikut berpartisipasi atau tidak dalam suatu kegiatan

salah satunya dipengaruhi oleh faktor subyektif seperti persepsi masyarakat itu sendiri terhadap kegiatan tersebut (Ngakan, 2006).

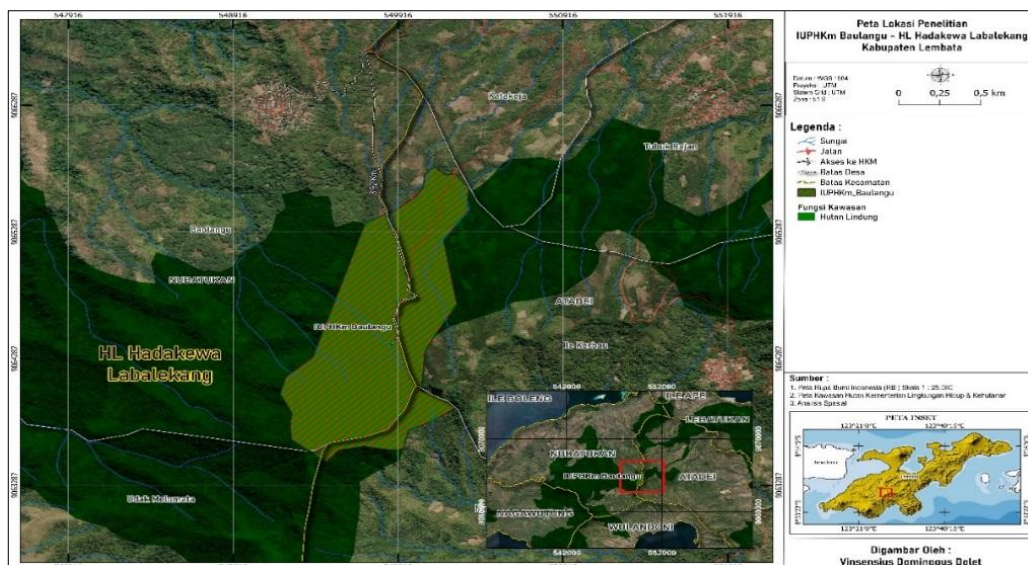
Hasil wawancara Mahasiswa Prodi Kehutanan Universitas Nusa Cendana saat melakukan Magang dan KKN-Tematik di UPT KPH Lembata bersama Ketua Gapoktan Hutan Belek Lerek menunjukkan bahwa dari 5 KTH yang terbentuk, hanya tersisa 1 KTH saja yang masih aktif yakni KTH Petik Pile, namun pada umumnya masyarakat dari 4 KTH lainnya tetap mengelola lahan HKm mereka.

Berdasarkan penjelasan ini, perlu dilakukan penelitian tentang Persepsi dan Partisipasi Gabungan Kelompok Tani Hutan Belek Lerek Terhadap Sistem Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus HKm Desa Baolangu, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengetahui apakah ada persepsi positif dari masyarakat tentang Hutan Kemasyarakatan yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam pengelolaan HKm Desa Baolangu.

2. METODOLOGI

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Baolangu, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah dilaksanakan pada bulan Oktober - Desember 2022.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.2 Alat Dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa Alat tulis, Kamera (*Handphone*), Perekam suara (*Handphone*), *Laptop*, GPS (*Global Positioning System*). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kuesioner dan Narasumber.

2.3 Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data-data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah karakteristik responden, persepsi dan partisipasi masyarakat serta gambaran umum kondisi HKm yang dikelola. Data-data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi kondisi umum lokasi penelitian, peta wilayah, kependudukan dan lain-lain.

Teknik-teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data primer dan sekunder yaitu:

- a. Teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan kuesioner. Pengumpulan data persepsi dan partisipasi (data primer) diperoleh dari hasil wawancara terstruktur dengan

menggunakan kuisisioner tertutup dengan pilihan jawaban menggunakan skala *likert*. Pilihan jawaban untuk persepsi masyarakat terhadap HKm yaitu (5) Sangat Setuju (SS), (4) Setuju (S), (3) Ragu-ragu (RR), (2) Tidak Setuju (TS) dan (1) Sangat Tidak Setuju (STS) sedangkan pilihan jawaban untuk partisipasi yaitu (4) Selalu (SL), (3) Sering (SR), (2) Kadang-kadang (KK) dan (1) Tidak Pernah (TP). Teknik wawancara tidak terstruktur dilakukan kepada pihak UPT KPH Kabupaten Lembata dan Pemerintah Desa Baolangu.

- b. Teknik pengamatan langsung.
- c. Studi pustaka

2.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian diperlukan sebagai acuan dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan membagikan daftar pertanyaan berupa kuesioner kepada responden untuk mendeskripsikan persepsi dan partisipasi masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek dalam sistem Hutan Kemasyarakatan di Desa Baolangu.

Tabel 1. Instrumen Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Jumlah Item
1	Persepsi Gapoktan Hutan	Sikap terhadap HKm	4
	Belek Lerek terhadap HKm	Persepsi terhadap HKm	8
2	Partisipasi Gapoktan Hutan	Perencanaan HKm	4
	Belek Lerek terhadap HKm	Pelaksanaan HKm	4
		Pemanfaatan HKm	4
		Monitoring dan Evaluasi HKm	3
Total			27

2.5 Teknik Pengambilan Responden

Teknik pengambilan responden untuk masyarakat Gapoktan Belek Lerek menggunakan metode sensus yakni mengambil satu kelompok populasi sebagai sampel secara keseluruhan dan menggunakan kuesioner yang terstruktur

sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mendapatkan informasi yang spesifik (Usman dan Akbar, 2008).

Pembagian kelompok dan jumlah anggota dalam Gapoktan Hutan Belek Lerek dapat dilihat sebagai berikut:

- a. KTH Petik Pile : 17 Orang
- b. KTH Wai Tenar : 12 Orang

- c. KTH Kayu Kanesak : 14 Orang
- d. KTH Kerbaol Tubal : 15 Orang
- e. KTH Lewokewek : 19 Orang
- Total : 77 Orang

Selain itu ada beberapa pihak yang dianggap penting sebagai informan dalam penelitian ini. Pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan yang ditetapkan dalam penelitian ini yakni Kepala UPT KPH Kabupaten Lembata dan Kepala Desa Baolangu.

2.6 Pengolahan dan Analisis Data

2.6.1 Perhitungan Skor Ideal

Dari data yang didapat diatas kemudian diolah dengan mengkalikan setiap point jawaban dengan bobot yang sudah ditentukan dengan tabel bobot nilai, hasil perkalian setiap bobotnya kemudian di jumlahkan.

$$\text{Skor Ideal} = T \times P_n$$

Keterangan:

T = Total jumlah responden yang memilih

P_n = Pilihan angka skor *likert*

2.6.2 Interpretasi Skor Perhitungan

Agar mendapatkan hasil interpretasi, terlebih dahulu harus diketahui skor tertinggi (Y) untuk mengetahui item penilaian dengan menggunakan rumus Indeks sebagai berikut dalam Sugiyono (2010):

$$Y = \text{Skor Tertinggi Likert} \times \text{Jumlah Responden}$$

Penilaian Interpretasi adalah nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus *Index %*:

$$\text{Rumus Index \%} = \text{Total Skor: } Y \times 100$$

2.6.3 Interval Penilaian

- a. Indeks Interval Penilaian Persepsi
 - Indeks 0% - 19,99% : Sangat Tidak Setuju = Sangat Buruk
 - Indeks 20% - 39,99% : Tidak

Setuju = Buruk

- Indeks 40% - 59,99% : Ragu-ragu = Netral

- Indeks 60% - 79,99% : Setuju = Baik

- Indeks 80% - 100% : Sangat Setuju = Sangat Baik

$$\text{Interval (rentang jarak)} = \frac{100}{\text{Jumlah Skor (Likert)}} = 20$$

- b. Indeks Interval Penilaian Partisipasi

- Indeks 0% - 24,99% : Tidak Pernah = Sangat Rendah

- Indeks 25% - 49,99% : Kadang-kadang = Rendah

- Indeks 50% - 74,99% : Sering = Tinggi

- Indeks 75% - 100% : Selalu = Sangat Tinggi

$$\text{Interval (rentang jarak)} = \frac{100}{\text{Jumlah Skor (Likert)}} = 25$$

2.6.4 Kesejahteraan Masyarakat

Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek. Adapun cara yang digunakan yaitu dengan menguji hipotesis rata-rata satu arah (kiri), dengan menggunakan rumus uji statistik z berdasarkan buku Pengantar Statistika Edisi Ke-3 oleh Ronald E. Walpole.

Rumus yang digunakan adalah:

$$Z_{\text{hitung}} = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

Keterangan:

$\bar{x}$ = pendapatan rata-rata per hari

μ = garis kemiskinan nasional

n = jumlah sampel responden

s = simpangan baku

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Desa Baolangu

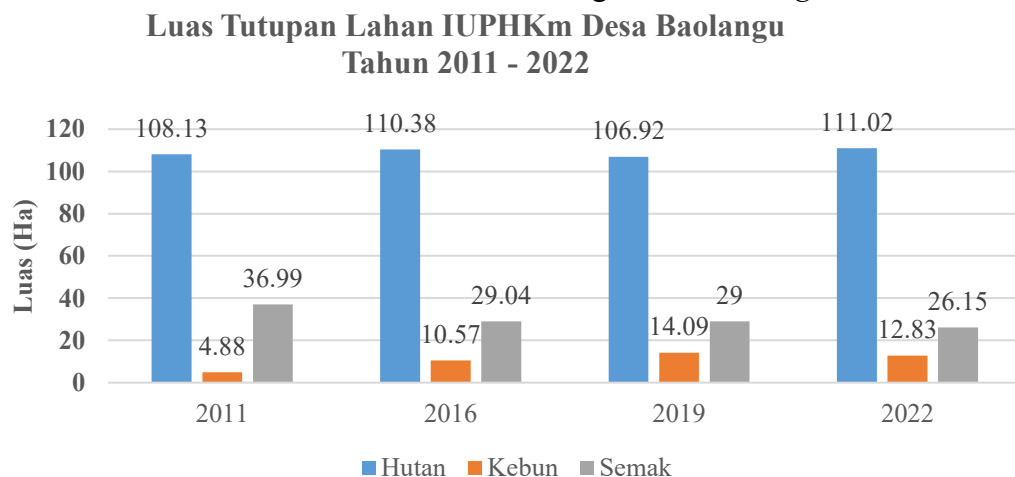
Desa Baolangu merupakan salah satu dari 14 desa dan kelurahan yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata yang memiliki luas wilayah 16,69 Km². Desa Baolangu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Desa Ulumado dan Desa Nubamado
- Timur berbatasan dengan Desa Katakeja dan Desa Tubukrajan
- Selatan berbatasan dengan Desa Ile Kerbau dan Desa Nogo Doni
- Barat berbatasan dengan Desa Paubokol dan Desa Bakalerek

Berdasarkan topografi, Desa Baolangu berada pada ketinggian >500 mdpl yakni daerah lereng atau punggung bukit dengan tingkat kemiringan tanah yaitu >40°. Jumlah penduduk di Desa Baolangu yaitu sebanyak 817 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 463 jiwa, penduduk perempuan 354 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 207 Kepala Keluarga (KK) dan umumnya bermata pencaharian sebagai petani.

3.2 Tutupan Lahan IUPHKm Desa Baolangu

Luas IUPHKm Desa Baolangu adalah $\pm$ 150 Ha yang berada dalam Kawasan Hutan Lindung Hadakewa-Labalekang. Berikut akan disajikan grafik tutupan lahan IUPHKm Desa Baolangu dari tahun 2011, 2016, 2019 dan tahun 2022 yang diperoleh melalui Digitasi Citra *Google Earth*.



Gambar 2. Grafik Tutupan Lahan Tahun 2011 – 2022

Berdasarkan Gambar 2, diketahui bahwa pada tahun 2011–2016, luas hutan, kebun mengalami peningkatan, dan luas semak mengalami penurunan. Pada tahun 2016–2019, luas kebun mengalami peningkatan, luas hutan dan semak mengalami penurunan. Pada tahun 2019–2022, luas hutan meningkat, luas kebun dan semak menurun.

3.2 Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Baolangu

Pada umumnya masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek masih menggunakan cara

yang sederhana dan mengembangkan pola tanam tumpang sari yaitu suatu bentuk pertanaman campuran (*polyculture*) berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Masyarakat mengelola HKm dengan menanam tanaman perkebunan, tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Sebelum mendapatkan IUPHKm, beberapa masyarakat terlebih dahulu merambah kawasan hutan dengan menanam tanaman perkebunan yaitu Kopi robusta (*Coffea canephora*) dan menanam Sengon (*Albizia chinensis*) sebagai tanaman

penaung dominan Kopi dan Kemiri yang ditanam secara acak.

Tanaman kayu pada areal HKm Desa Baolangu didominasi oleh Kaliandra, tanaman hortikultura didominasi oleh sayur Labu siam, Sawi, Buncis, tanaman obat berupa Jahe dan Serai sedangkan tanaman pangan berupa Ubi jalar, Ubi talas, Singkong, Porang dan Pisang kepok.

3.3 Kesejahteraan Masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek

Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2023 adalah sebesar Rp. 2.592.657/bulan atau sama dengan Rp. 86.421,9 /hari. (Berita Resmi Statistik No. 47/07/Th. XXVI, 17 Juli 2023 - BPS).

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka perlu dilakukan uji hipotesis rata-rata satu arah (kiri) untuk membuktikan apakah masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan dan dinyatakan sejahtera atau sebaliknya. Berikut penyelesaiannya:

1. Menentukan Hipotesis dan Formulasinya

- H_0 = Rata-rata pendapatan masyarakat lebih kecil sama dengan garis kemiskinan rumah tangga (Rp. 86.421,9), dan dinyatakan KKMiskin ($H_0 : \mu \leq \text{Rp. 86.421,9}$)
- H_1 = Rata-rata pendapatan masyarakat lebih besar dari garis kemiskinan rumah tangga (Rp.

86.421,9), dan dinyatakan sejahtera ($H_1 : \mu > \text{Rp. 86.421,9}$).

2. Menentukan taraf nyata/signifikan (α)

$$\alpha = 5\% = 0,05$$

3. Menentukan uji statistik

$n > 30$ dan σ (standar deviasi) belum diketahui, jadi digunakan uji statistik z

$$Z_{\text{hitung}} = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

Keterangan:

$\bar{x}$ = pendapatan rata-rata per hari (HKm+ non HKm)

μ = garis kemiskinan nasional

n = jumlah sampel responden

s = simpangan baku, dimana:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (xi - \bar{x})^2}{n}} = 49.044,1$$

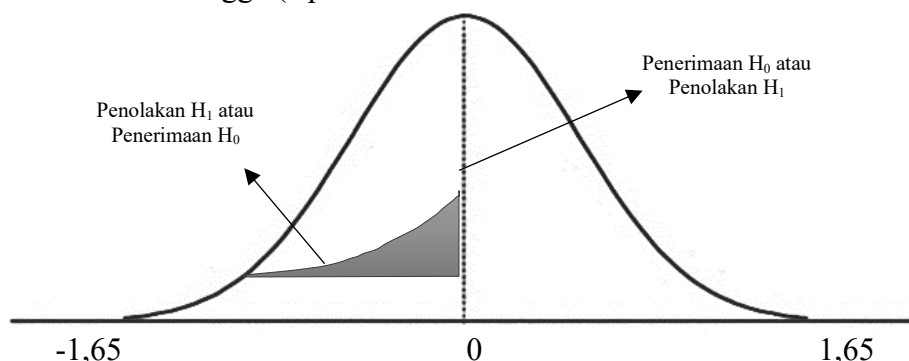
Keterangan:

xi = pendapatan per hari orang ke-i

$$Z_{\text{hitung}} = \frac{35.841,83 - 86.421,9}{49.044,1/\sqrt{77}} = -9,04$$

$$Z_{\text{tabel}} = Z_{1-0,05} = Z_{0,95} = -1,65$$

4. Menentukan daerah dan kriteria keputusan



Gambar 3. Kurva Sebaran Distribusi Uji Hipotesis Rata-rata Satu Arah
Apabila nilai $Z_{\text{hitung}} \leq \text{nilai } Z_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

5. Mengambil kesimpulan

Rata-rata pendapatan masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek lebih kecil dari garis kemiskinan rumah tangga (Rp86.421,9), maka dinyatakan sebagai KK miskin.

3.4 Persepsi Masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek Terhadap HKm

3.4.1 Sikap Masyarakat Terhadap Hutan Kemasyarakatan

Hasil yang diperoleh dari analisis tingkat sikap masyarakat menggunakan skala *likert*, dari 4 pertanyaan dengan jumlah 77 responden maka disimpulkan bahwa sikap masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek tergolong baik (59,94%). Berikut rincian masing-masing angket:

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu menerima keberadaan HKm di Desa Baolangu”? Jawaban skor dengan pilihan sangat setuju = 6, setuju = 66, ragu-ragu = 4, tidak setuju = 1, dan sangat tidak setuju = 0. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 80% (sangat baik). IUPHKm yang diberikan pemerintah pada tahun 2019 telah memberikan kesempatan kepada masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek untuk turut mengelola kawasan hutan secara legal dengan menanam berbagai jenis tanaman dan dilihat dari sejarahnya, masyarakat memiliki keterikatan dengan areal HKm karena merupakan bekas pemukiman mereka dahulu. Hasil panen tanaman di areal HKm dapat dikonsumsi sehari-hari dan selebihnya dapat dijual.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah kegiatan HKm yang dilakukan sesuai dengan potensi masyarakat dan desa”? Jawaban skor dengan pilihan sangat setuju = 0, setuju = 5, ragu-ragu = 22, tidak setuju = 50, dan sangat tidak setuju = 0. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 48,31% (netral). Menurut masyarakat, areal HKm Desa Baolangu memiliki lahan yang subur yang mana tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman holtikultura yang ditanam masyarakat dapat tumbuh dan memiliki hasil panen yang baik, namun hal

ini belum didukung dengan ketersediaan modal usaha, sumber daya masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Noviana (2006), menyatakan bahwa beragam potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pengembangan dan kemandirian desa mereka, antara lain adanya lembaga atau institusi sosial, serta nilai-nilai yang mendukung pembangunan seperti nilai kebersamaan, gotong royong dan kesetiakawanan.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah menurut Bapak/Ibu, program HKm membawa kesejahteraan bagi masyarakat”? Jawaban skor dengan pilihan sangat setuju = 0, setuju = 26, ragu-ragu = 4, tidak setuju = 21, dan sangat tidak setuju = 26. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 47,79% (netral). Masyarakat menilai bahwa program HKm dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat apabila masyarakat lebih terlibat aktif mengelola lahan HKm, salah satu contohnya dengan menanam banyak jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal ini belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan faktor ketersediaan modal, sarana prasarana, serta kurangnya pemberdayaan dari pemerintah.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu setuju HKm di Desa Baolangu perlu dijaga kelestariannya”? Jawaban skor dengan pilihan sangat setuju = 2, setuju = 10, ragu-ragu = 65, tidak setuju = 0, dan sangat tidak setuju = 0. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 63,64% (baik). Berdasarkan hasil wawancara, umumnya masyarakat menjawab ragu-ragu dikarenakan dilahan HKm mereka banyak terdapat tanaman Kaliandra yang mana masyarakat terpaksa memangkas bahkan menebang sebagai persiapan lahan untuk menanam tanaman perkebunan dan holtikultura. Dengan diterbitkannya IUPHKm pada tahun 2019, masyarakat mulai memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian HKm. Hal ini dapat dilihat dari peta tutupan lahan IUPHKm Desa Baolangu dari tahun 2019 sampai tahun 2022, dimana luasan hutan bertambah dari 106,92 Ha ke 111.02 Ha, luas kebun berkurang dari 14.091 Ha ke 12.83 Ha

dan luas semak yang berkurang dari 29 Ha ke 26 Ha.

3.4.2 Persepsi Masyarakat Terhadap Hutan Kemasyarakatan

Hasil yang diperoleh dari analisis tingkat persepsi masyarakat menggunakan skala *likert* dari 8 pertanyaan dengan jumlah 77 responden maka disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek tergolong netral (52,47%). Berikut rincian masing-masing angket:

Berdasarkan pertanyaan “Apakah dengan adanya IUPHKm, memberikan kepastian hak akses kepada masyarakat untuk turut mengelola kawasan hutan?” Jawaban skor dengan pilihan sangat setuju = 20, setuju = 56, ragu-ragu = 1, tidak setuju = 0, dan sangat tidak setuju = 0. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 84,94% (sangat baik). Areal HKm Desa Baolangu merupakan bekas pemukiman masyarakat sebelum dikeluarkan dari kawasan Hutan Lindung Hadakewa-Labalekang (RTK 130) pada tahun 1982. Setelah dikeluarkan, masyarakat kembali merambah kawasan hutan lindung secara ilegal dikarenakan faktor kebutuhan hidup. Dengan adanya IUPHKm di Desa Baolangu, masyarakat mendapatkan kepastian hak akses untuk turut mengelola kawasan hutan.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu setuju, keberadaan HKm dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga?” Jawaban skor dengan pilihan sangat setuju = 5, setuju = 51, ragu-ragu = 8, tidak setuju = 3, dan sangat tidak setuju = 10. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 69,87% (baik). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di areal HKm, sebagian besar masyarakat sudah mengelola lahan HKm dengan menanam tanaman perkebunan, tanaman pangan dan tanaman hortikultura yang mana hasilnya selain untuk dikonsumsi dapat juga dijual untuk menambah pendapatan rumah tangga. Masyarakat yang belum mengelola lahan HKm mengaku belum mendapatkan pendapatan dikarenakan belum ada hasil HKm yang dapat dijual. Menurut masyarakat, besarnya pendapatan masyarakat dari lahan HKm dipengaruhi oleh jenis dan jumlah tanaman yang dipanen, hasil

panen, frekuensi panen tiap tanaman, dan harga jual.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu setuju, kehadiran HKm dapat memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan baru bagi masyarakat?” Jawaban skor dengan pilihan sangat setuju = 3, setuju = 20, ragu-ragu = 24, tidak setuju = 30, dan sangat tidak setuju = 0. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 58,97% (netral). Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek menilai belum dan sebagian lagi mengaku belum mendapatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan baru sejak kehadiran HKm. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan masyarakat itu sendiri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan lembaga terkait seperti KPH Lembata.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan HKm sudah memadai?” Jawaban skor dengan pilihan sangat setuju = 0, setuju = 0, ragu-ragu = 1, tidak setuju = 58, dan sangat tidak setuju = 18. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 35,58% (buruk). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dalam pengelolaan HKm Desa Baolangu, masyarakat masih kekurangan sarana dan prasarana seperti peralatan kerja, dan ketersediaan air saat musim kemarau, fasilitas administratif, infrastruktur jalan dan transportasi yang memadai untuk memudahkan aksesibilitas, distribusi hasil hutan, dan transportasi masyarakat. Saat musim kemarau masyarakat dapat menyewa mobil *pick up* dan ojek dengan tarif Rp.5.000-10.000/karung dan saat musim hujan masyarakat hanya bisa menyewa ojek karena kondisi jalan yang berlumpur dan licin dengan tarif mencapai Rp.20.000/karung. Pemerintah telah membangun Jalan Usaha Tani (JUT) di beberapa titik yang parah, namun masyarakat merasa belum cukup membantu.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah dengan adanya Kelompok Tani Hutan, pengelolaan HKm menjadi lebih baik?” Jawaban skor dengan pilihan sangat setuju =

3, setuju = 8, ragu-ragu = 5, tidak setuju = 26, dan sangat tidak setuju = 35. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 38,70% (buruk). Berdasarkan hasil wawancara, awalnya semua kelompok tani hutan menerapkan sistem kerja gotong-royong dan hal ini sangat membantu masyarakat dalam segi waktu dan tenaga, namun seiring berjalannya waktu beberapa anggota tidak ikut dalam gotong royong sehingga menimbulkan kesenjangan antar anggota dalam kelompok. Ketidakterbukaan pengurus kelompok terkait anggaran pemberdayaan maupun swadaya menyebabkan anggota kurang berminat untuk mengikuti pertemuan rutin kelompok tani hutan. Pengurus kelompok tani hutan juga belum merangkul anggota untuk mengelola dan mengembangkan potensi kelompok tani hutan. Sugiyarti *et al.*, (2015) berpendapat bahwa komunikasi yang terbuka dan kepemimpinan yang adil akan membangun dan mengembangkan tingkat kepercayaan dalam kelompok.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga terkait seperti KPH Lembata berjalan baik?” Jawaban skor dengan pilihan sangat setuju = 3, setuju = 17, ragu-ragu = 34, tidak setuju = 23, dan sangat tidak setuju = 0. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 60% (baik). Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek merasa terbantu dan cukup puas dengan adanya KPH Lembata yang mana telah memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). KPH Lembata juga telah berupaya membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan tujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola kelompok sehingga masyarakat menjadi lebih berdaya dan sejahtera, namun kegiatan ini tidak berjalan karena ketidakhadiran sebagian besar masyarakat.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah aspek kelembagaan Gapoktan Hutan Belek Lerek berjalan dengan baik?” Jawaban skor dengan pilihan sangat setuju = 0, setuju = 0,

ragu-ragu = 5, tidak setuju = 50, dan sangat tidak setuju = 22. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 35,58% (buruk). Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menilai bahwa pengurus Gapoktan Hutan Belek Lerek belum menjalankan tugasnya dalam membangun kelembagaan yang baik dalam pengelolaan HKm. Hal ini dapat dilihat dari ketidakpedulian pengurus Gapoktan untuk kelompok-kelompok tani hutan yang tidak aktif. Selain itu Gapoktan Hutan Belek Lerek belum menyusun rencana kerja, AD/ART (Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga) dan beberapa masyarakat tidak setuju dengan kepengurusan Gapoktan karena dipilih tidak dengan asas demokrasi melainkan ditunjuk oleh kepala desa.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Pemerintah Daerah mendukung dengan menyediakan jaringan pemasaran hasil HKm?” Jawaban skor dengan pilihan sangat setuju = 0, setuju = 0, ragu-ragu = 2, tidak setuju = 58, dan sangat tidak setuju = 17. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 36,10% (buruk). Masyarakat lebih banyak banyak memasarkan hasil HKm mereka di pasar-pasar yang ada di Kota Lewoleba. Pemerintah sendiri telah menyediakan tempat untuk masyarakat namun sistem pengaturan pasar masih belum menguntungkan karena masih banyak pedagang dari luar Kabupaten Lembata seperti dari Pulau Adonara dan Maumere juga ikut bersaing sehingga hasil-hasil HKm banyak yang tidak laku dan terpaksa dibawa pulang.

3.5 Partisipasi Masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek Terhadap HKm

3.5.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan HKm

Hasil yang diperoleh dari analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan HKm menggunakan skala *likert* dari 4 pertanyaan dengan jumlah 77 responden maka disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek dalam perencanaan HKm

tergolong rendah (45,82%). Berikut rincian masing-masing angket:

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan HKM?” Jawaban skor dengan pilihan selalu terlibat = 4, sering terlibat = 13, kadang-kadang = 2 dan tidak pernah terlibat = 58. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 38,36% (rendah). Kelembagaan Gapoktan Hutan Belek Lerek yang buruk menyebabkan belum ada pertemuan untuk seluruh masyarakat guna membahas rencana kegiatan HKM, yang mana menjadi aturan main yang berlaku dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat. KTH Petik Pile merupakan kelompok yang masih aktif dan berorientasi pada tanaman Kopi, cenderung menjadi kelompok penggerak sementara serta pengambil keputusan terkait pengelolaan HKM. Maryudi (2016), menyatakan bahwa kelembagaan harus diterjemahkan dalam aturan main yang disepakati sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi sosial.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam pemberian ide atau gagasan terkait pengelolaan HKM?” Jawaban skor dengan pilihan selalu terlibat = 7, sering terlibat = 8, kadang-kadang = 7 dan tidak pernah terlibat = 55. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 39,67% (rendah). Berdasarkan hasil wawancara, belum adanya pertemuan-pertemuan kelompok dan Gapoktan sehingga masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan ide dan tukar pikiran terkait pengelolaan HKM.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penentuan jenis tanaman dan areal penanaman?” Jawaban skor dengan pilihan selalu terlibat = 13, sering terlibat = 35, kadang-kadang = 22 dan tidak pernah terlibat = 7. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 68,20% (tinggi). Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat sendiri menentukan jenis tanaman yang akan ditanam dan areal penanaman di lahan HKM masing-masing.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam perencanaan untuk peningkatan kegiatan dan keamanan HKM?” Jawaban skor dengan pilihan selalu terlibat = 3, sering terlibat = 12, kadang-kadang = 3 dan tidak pernah terlibat = 59. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 37,05% (rendah). Kelembagaan Gapoktan Hutan Belek Lerek belum memiliki rencana kerja dan aturan main dalam bentuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sehingga belum ada wacana untuk peningkatan kegiatan pengolahan dan keamanan dalam areal HKM.

3.5.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan HKM

Hasil yang diperoleh dari analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan HKM menggunakan skala *likert* dari 4 pertanyaan dengan jumlah 77 responden maka disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek dalam pelaksanaan HKM tergolong tinggi (58,77%). Berikut rincian masing-masing angket:

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan pembersihan areal tanam?” Jawaban skor dengan pilihan selalu terlibat = 10, sering terlibat = 27, kadang-kadang = 32 dan tidak pernah terlibat = 8. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 63,28% (tinggi). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sebagian besar masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek sudah mengelola lahan HKM mereka dengan diawali dengan proses pembersihan areal tanam sebelum melakukan penanaman tanaman. Dalam kegiatan pembersihan lahan, masyarakat menggunakan peralatan yang masih sederhana seperti parang, cangkul, sisir rumput dan tofa. Masyarakat umumnya jarang menggunakan herbisida dikarenakan biayanya yang cukup mahal dan harus memerlukan tangki semprot.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan pengadaan bibit dan penanaman?” Jawaban skor dengan pilihan selalu terlibat = 7, sering terlibat = 26, kadang-kadang = 33 dan tidak pernah terlibat = 11. Dari hasil tersebut didapatkan skor

perhitungan sebesar 60% (tinggi). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, tidak semua bibit untuk penanaman berasal dari masyarakat, namun merupakan bantuan dari pemerintah dan dinas-dinas terkait dikarenakan keterbatasan dana dan akses masyarakat. Kegiatan penanaman dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan pemeliharaan tanaman?” Jawaban skor dengan pilihan selalu terlibat = 8, sering terlibat = 34, kadang-kadang = 25 dan tidak pernah terlibat = 10. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 63,60% (tinggi). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, masyarakat melakukan pemeliharaan tanaman dengan tujuan agar tanaman dapat tumbuh dengan subur sehingga menghasilkan panen yang baik. Masyarakat yang memiliki kebun pribadi diluar areal HKm mengaku kurang melakukan pemeliharaan tanaman dikarenakan masih memiliki kebun pribadi diluar areal HKm sehingga hasil panen tanaman kurang maksimal.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait?” Jawaban skor dengan pilihan selalu terlibat = 13, sering terlibat = 6, kadang-kadang = 19 dan tidak pernah terlibat = 39. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 48,20% (rendah). Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar masyarakat tidak terlibat dalam pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dikarenakan faktor kelompok-kelompok tani hutan mereka tidak berjalan. KTH Petik Pile merupakan kelompok yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan terkait pengolahan Kopi dari pemerintah dan umumnya anggotanya terlibat aktif.

3.5.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan HKm

Hasil yang diperoleh dari analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan HKm menggunakan skala *likert* dari 4 pertanyaan dengan jumlah 77

responden maka disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek dalam pemanfaatan HKm tergolong tinggi (61,29%). Berikut rincian masing-masing angket:

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan pemanenan di lahan HKm?” Jawaban skor dengan pilihan selalu terlibat = 12, sering terlibat = 36, kadang-kadang = 22 dan tidak pernah terlibat = 7. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 67,87% (tinggi). Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang sudah mengelola lahan HKm melakukan kegiatan pemanenan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selebihnya dijual untuk menambah pendapatan rumah tangga.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam pendampingan dan pelatihan untuk membuat produk olahan hasil HKm?” Jawaban skor dengan pilihan selalu terlibat = 15, sering terlibat = 2, kadang-kadang = 2 dan tidak pernah terlibat = 58. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 41,56% (rendah). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dari 5 KTH yang terbentuk, baru KTH Petik Pile yang mendapatkan pendampingan dan pelatihan untuk membuat produk olahan Kopi dan umumnya anggota KTH petik Pile terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam penggunaan hasil HKm untuk konsumsi rumah tangga?” Jawaban skor dengan pilihan selalu terlibat = 21, sering terlibat = 40, kadang-kadang = 10 dan tidak pernah terlibat = 6. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 74,68% (tinggi). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sebagian besar masyarakat melakukan pemanenan hasil HKm untuk dikonsumsi sehari-hari. Tanaman yang paling sering dipanen untuk dikonsumsi adalah sayur Labu siam, Singkong, Ubi Jalar dan Ubi talas. Tidak semua masyarakat memiliki lahan pribadi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya masyarakat mendapatkannya dari lahan HKm.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan pemasaran hasil HKm?” Jawaban skor dengan pilihan selalu terlibat = 13, sering terlibat = 23, kadang-kadang = 26 dan tidak pernah terlibat = 15. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 61,04% (tinggi). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, tidak semua masyarakat memasarkan hasil HKm mereka, beberapa masyarakat memanen hasil HKm hanya untuk dikonsumsi sehari-hari. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jenis dan jumlah tanaman yang dipanen, hasil dan frekuensi panen tiap tanaman.

3.5.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring dan Evaluasi HKm

Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi HKm merupakan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian yang melibatkan para pihak terkait terhadap pelaksanaan HKm dalam rangka mengetahui peningkatan kemajuan, perkembangan, dan hambatan pengelolaan HKm dari rencana kerja yang telah dibuat dan sebagai media belajar bersama (Cahyaningsih *et al.* 2006).

Hasil yang diperoleh dari analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi HKm menggunakan skala *likert* dari 3 pertanyaan dengan jumlah 77 responden maka disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek dalam monitoring dan evaluasi HKm tergolong rendah (36,71%). Berikut rincian masing-masing angket:

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam memonitoring perkembangan kegiatan pengelolaan HKm yang sedang dilakukan?” Jawaban skor dengan pilihan selalu terlibat = 6, sering terlibat = 10, kadang-kadang = 1 dan tidak pernah terlibat = 60. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 37,66% (rendah). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sebagian besar masyarakat cenderung mengelola HKm secara individual. Kelembagaan Gapoktan Hutan Belek Lerek yang buruk mengakibatkan sampai saat ini Gapoktan belum menyusun rencana kerja

dan AD/ART sebagai pedoman untuk mengatur seluruh kegiatan pengelolaan HKm demi terwujudnya tujuan bersama sehingga belum ada monitoring perkembangan seluruh kegiatan pengelolaan HKm yang sedang dilakukan.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam evaluasi seluruh kegiatan pengelolaan HKm yang telah dilakukan?” Jawaban skor dengan pilihan selalu terlibat = 3, sering terlibat = 12, kadang-kadang = 2 dan tidak pernah terlibat = 60. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 36,36% (rendah). Gapoktan Hutan Belek Lerek belum pernah melakukan evaluasi bersama guna mengetahui peningkatan kemajuan, perkembangan, dan hambatan pengelolaan HKm. Gapoktan Hutan Belek Lerek belum memiliki rencana umum untuk mengatur kegiatan kelompok tani hutan dengan tujuan untuk menciptakan pola kebersamaan dalam pengelolaan hutan yang berkesinambungan sesuai konsep kelembagaan.

Berdasarkan pertanyaan “Apakah Bapak/Ibu terlibat dalam pemberian saran atau ide tentang solusi agar kendala yang dihadapi dapat teratasi?” Jawaban skor dengan pilihan selalu terlibat = 4, sering terlibat = 7, kadang-kadang = 6 dan tidak pernah terlibat = 60. Dari hasil tersebut didapatkan skor perhitungan sebesar 35,74% (rendah). Berdasarkan hasil wawancara, kelembagaan Gapoktan dan kelompok yang buruk, mengakibatkan tidak ada pertemuan-pertemuan serta diskusi bersama, sehingga sebagian masyarakat tidak memiliki ruang untuk menyampaikan ide tentang solusi terkait kendala-kendala yang dijumpai dalam pengelolaan HKm.

Monitoring dan Evaluasi dari pemerintah terkait IUPHKm Desa Baolangu akan dilakukan setiap 5 tahun sekali seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 7580/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019 Tentang Pemberian IUPHKm kepada Gapoktan Hutan Belek Lerek.

3.6 Deskripsi Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek Terhadap HKm

Berdasarkan kajian data hasil angket diperoleh Persepsi dan Partisipasi

masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek terhadap HKm Desa Baolangu sebagai berikut:

Tabel 2. Deskripsi Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap HKm

Variabel	Indikator	Total Skor	Index (%)	Kategori
Persepsi	Sikap terhadap HKm	230,75	59,94	Netral
Masyarakat	Persepsi terhadap HKm	202	52,47	Netral
Partisipasi	Partisipasi dalam perencanaan HKm	139,75	45,82	Rendah
Masyarakat	Partisipasi dalam pelaksanaan HKm	179,25	58,77	Tinggi
	Partisipasi pemanfaatan HKm	188,25	61,29	Tinggi
	Partisipasi dalam monitoring dan evaluasi HKm	112,33	36,71	Rendah

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa sikap masyarakat tergolong netral (59,94%), persepsi masyarakat tergolong netral (52,47%) partisipasi dalam perencanaan tergolong rendah (45,82%), partisipasi dalam pelaksanaan tergolong tinggi (58,77%), partisipasi dalam pemanfaatan tergolong tinggi (61,29%), partisipasi dalam monitoring dan evaluasi tergolong rendah (36,71%).

Pernyataan sikap positif (baik) masyarakat antara lain, masyarakat menerima keberadaan HKm dan masyarakat perlu menjaga kelestarian HKm sedangkan HKm membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan pengelolaan HKm sesuai dengan potensi masyarakat dan desa, sikap masyarakat adalah netral. Sikap positif (baik) masyarakat menerima keberadaan HKm dan menjaga kelestarian HKm dengan alasan masyarakat mendapatkan kepastian hak akses untuk turut mengelola kawasan hutan secara legal melalui pengolahan lahan dengan menanam tanaman perkebunan, tanaman pangan dan tanaman hortikultura yang hasilnya selain untuk dikonsumsi dapat juga dijual untuk menambah pendapatan masyarakat. Hal ini didukung oleh persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa IUPHKm telah memberikan kepastian hak akses kepada masyarakat untuk turut mengelola kawasan hutan, keberadaan HKm dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga terkait seperti KPH

Lembata berjalan baik sehingga partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan pemanfaatan tergolong tinggi. Selain itu dilihat dari sejarahnya masyarakat memiliki keterikatan dengan areal HKm yang mana adalah bekas pemukiman mereka dahulu.

Sikap netral masyarakat bahwa HKm membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan pengelolaan HKm sesuai dengan potensi masyarakat dan desa dikarenakan masyarakat menilai bahwa program HKm dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat apabila masyarakat lebih terlibat aktif mengelola lahan HKm, salah satu contohnya dengan menanam banyak jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Masyarakat menilai bahwa areal HKm adalah daerah yang subur, hasil panen tanaman dapat dikonsumsi dan selebihnya dapat dijual untuk menambah pendapatan rumah tangga, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga terkait seperti KPH Lembata sudah berjalan baik, namun hal ini belum didukung dengan ketersediaan modal masyarakat, sarana prasarana penunjang serta kurangnya pemberdayaan dari pemerintah. Hal ini didukung oleh persepsi masyarakat mengenai ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan HKm yang belum memadai dan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mendukung masyarakat dengan menyediakan jaringan pemasaran hasil HKm. Selain itu masyarakat menilai bahwa kelembagaan Gapoktan Hutan Belek Lerek dan kelompok tani hutan

belum membawa dampak bagi pengelolaan HKm yang lebih baik, sehingga partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, monitoring dan evaluasi HKm tergolong rendah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Partisipasi masyarakat Gabungan Kelompok Tani Hutan Belek Lerek tahap pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan tergolong tinggi (58,77%), dan tahap pemanfaatan tergolong tinggi (61,29%), dikarenakan masyarakat mengelola areal Hutan Kemasyarakatan mereka masing-masing dengan menanam tanaman perkebunan, pangan dan holtikultura yang hasilnya selain untuk dikonsumsi dapat juga dijual. Hal ini dipengaruhi oleh adanya persepsi positif masyarakat tentang Hutan Kemasyarakatan Desa Baolangu, dimana IUPHKm memberikan kepastian hak akses kepada masyarakat untuk turut mengelola kawasan hutan, keberadaan Hutan Kemasyarakatan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga terkait seperti KPH Lembata berjalan baik.

1.2 Saran

1. Kepada Pemerintah
 - a. KPH Lembata diharapkan lebih intensif melakukan sosialisasi, pendampingan, serta penguatan kelembagaan Gapoktan Hutan Belek Lerek sehingga meningkatkan kedinamisan, keberfungsian, dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan HKm demi terciptanya hutan yang lestari dan masyarakat yang sejahtera. Rendahnya pengetahuan masyarakat harus menjadi perhatian utama dari KPH Lembata.
 - b. Pemerintah Daerah diharapkan agar membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung masyarakat seperti

bantuan anggaran pemberdayaan, sarana dan prasarana penunjang pengelolaan HKm kepada masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek.

2. Kepada Masyarakat

- a. Perlu adanya kesadaran pengurus Gapoktan Hutan Belek Lerek dan kelompok tani hutan yang ditunjuk untuk merangkul masyarakat agar meningkatkan kapasitas kelompok dalam mengelola kelembagaan, kawasan, dan usaha demi terwujudnya kelompok tani hutan yang produktif, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.
- b. Masyarakat Gapoktan Belek Lerek diharapkan lebih melibatkan diri dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh pihak KPH Lembata dan instansi terkait.
- c. Masyarakat Gapoktan Hutan Belek Lerek diharapkan agar menghidupkan kembali kelompok-kelompok tani hutan yang telah dibentuk dan lebih berpartisipasi dalam mengelola lahan HKm dengan menanam berbagai macam tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, P.S., & Usman. 2008. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Cahyaningsih, Nurka, Gamal Pasya, Warsito. 2006. *HKm Lampung Barat: Panduan Cara memproses Perijinan dan Kiat Sukses menghadapi Evaluasi*. World Agroforestry Centre Asia Tenggara dan Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat.
- Heryatna, D., Zainal, S., & Husni, H. (2015). *Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Hutan Kemasyarakatan*

- di Desa Meragun Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau. Jurnal Hutan Lestari*, 4(1).
- Maryudi, A. (2016). *Arahan Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia. Jurnal Ilmu Kehutanan*, 10(1), 57-64.
- Ngakan, P.O., Komarudin, H., Achmad, A., Wahyudi, Tako, A., 2006. *Ketergantungan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan. Studi Kasus di Dusun Pampli Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Center For International Forestry Research. Intiprima Karya, Jakarta 2012*
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 *Tentang Perhutanan Sosial*
- Sugiyarti, I. Sardi, A. & Mara., 2015, *Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kepercayaan (Trust) di KUD Berdikari Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis* 18(1), 1 - 9.
- Walpole, Ronald E. 1995. *Pengantar Statistika Edisi ke-3*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zulevi, X. F., & Adiwibowo, S. (2018). *Pengaruh Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Nagari Simancuang terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 13-28.